
BARA DI BALIK CITRA: KEKERASAN TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI YOGYAKARTA PADA MASA REVOLUSI 1945-1949

Vennesa Theonia

vennesa.theonia@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Citra Yogyakarta sebagai wilayah yang relatif aman pada masa Revolusi, bahkan bagi etnis Tionghoa, tidak berarti Yogyakarta sepenuhnya nihil dari kekerasan. Terdapat kekerasan di Kota Yogyakarta (Kota Gede), Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman (Prambanan). Dengan studi literatur dan metode penelitian sejarah, ditemukan bahwa dua alasan utama terjadinya kekerasan adalah ambivalensi keberpihakan politik Tionghoa dengan Belanda dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, kekerasan yang terjadi memengaruhi pandangan simpatik masyarakat Tionghoa terhadap Belanda dan kekecewaan terhadap pemerintah Republik.

Kata Kunci

*Kekerasan;
Tionghoa;
Yogyakarta;
Revolusi*

Abstract

The image of Yogyakarta as a relatively safe area during the Revolution, even for ethnic Chinese, did not mean that Yogyakarta was completely devoid of violence. There was violence in Yogyakarta City (Kota Gede), Bantul Regency, and Sleman Regency (Prambanan). Using literature study and historical research methods, it was found that the two main reasons for the violence were the ambivalence of Chinese political alignment with the Dutch and economic inequality. In addition, the violence influenced the Chinese community's sympathetic view of the Dutch and disappointment with the Republican government

Keywords

*Violence;
Chinese-
Indonesia;
Yogyakarta;
Revolution*

Pendahuluan

Yong Tjie Fong tidak mengetahui nasib yang menantinya ketika ia dikumpulkan di pendopo dari Assistent Desa Dukuh, Yogyakarta. Ketika pagi tiba, ia dan kepala rumah tangga Tionghoa lainnya berhimpit-himpit, diangkut menyusuri Gunung Gono. Matahari menunjukkan dirinya; menjadi saksi atas ajal yang akan tiba. Pertunjukan keji dimulai dari penyiksaan Liem Djien Tjong, sebelum tubuhnya ditusuki bayonet hingga tewas. Sebuah pedang besar lalu dikeluarkan, menyembelih Tjong Leng setelahnya. Pembunuhan terus terjadi satu per satu. Yong Tjie Fong dan sisa orang Tionghoa yang belum terbunuh diperintahkan untuk mengubur mayat-mayat itu (Sin Po, 31 Desember 1948).

Mereka digiring ke markas pembunuh-pembunuh itu keesokan harinya.

Di Markas dari itoe algodjo-algodjo jang kedjem, marika laloe moelai dipreksa dan katanja diexamen ... marika ditanja dengan berbagi-bagi perantjaraan dalem bahasa-bahasa Indonesia (Melajoe) kamoedian dalem bahasa Boso (Djawa). Kaloe marika bisa berbitjara dalem doea bahasa itoe dengan lantjar, maka ia diperbolehkan poelang (Sin Po, 31 Desember 1948)..

Berkat penguasaan kedua bahasa itu, Yong Tjie Fong diperbolehkan pergi. Ia berlari ke kota dan memberitahukan hal ini kepada Chung Hua Tsung Hui (CHTH) (Sin Po, 31 Desember 1948).¹

Kisah ini hanyalah salah satu anomali dalam citra harmonis hubungan Tionghoa-Jawa di Yogyakarta. Citra-citra ini dapat ditemukan dalam berbagai penelitian yang dilakukan, baik mengenai orang Tionghoa di Yogyakarta maupun Yogyakarta masa Revolusi. Mengutip Fakhri (2017), “Yogyakarta, ibu kota revolusioner, (adalah) salah satu daerah yang relatif damai dan stabil padahal di berbagai tempat tengah dilanda situasi genting yang penuh pergolakan.” Setyowati (2018) juga menyatakan bahwa pembantaian kerap terjadi di Jawa, tetapi orang Tionghoa di Yogyakarta tetap adem ayem. Klaim lain dituliskan oleh Putri (2013). Ia menyatakan bahwa penemuan prasasti Tionghoa-Jawa yang penyerahannya kepada sultan dipersiapkan sejak 1940 merupakan “bukti akan kehidupan masyarakat Tionghoa di Yogyakarta yang hidup sejahtera tanpa penindasan dan tekanan.” Namun, kutipan di awal menjadi salah satu bukti adanya celah dalam citra ini. Cerita tersebut menunjukkan adanya kekerasan yang tertuju secara spesifik kepada etnis Tionghoa.

Konteks wilayah Yogyakarta juga unik dalam kasus ini. Pada masa Revolusi, Yogyakarta merupakan ibukota Republik. Pemerintahan dipindahkan dari Batavia dan militerisasi terjadi. Oleh karenanya, terdapat banyak agen di dalamnya, seperti pemerintah

¹ Chung Hua Tsung Hui adalah asosiasi yang bertujuan menyatukan etnis-etnis Cina untuk membuat kesepakatan dan berkoperasi dengan kelompok serta organisasi lainnya.

Republik, militer Republik, tentara Belanda, dan masyarakat secara umum. Dengan berbagai agen yang ada, hubungan-hubungan di dalamnya perlu diperhatikan untuk memetakan sifat dari kekerasan ini. Penelitian ini mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, Bagaimana hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan agen-agen lain di Yogyakarta menuju masa revolusi? Kedua, apa motif dan kepentingan di balik kekerasan terhadap Tionghoa pada masa Revolusi? Penelitian ini juga ingin menghadirkan kebaruan dalam melihat hubungan di Yogyakarta dalam aspek sosiokultural. Penemuan tersebut akan didukung oleh rekonstruksi kekerasan yang terjadi dengan memperhatikan siapa pelaku dan korban yang terlibat. Dengan demikian, diharapkan penulisan sejarah mengenai kekerasan terhadap Tionghoa ini dapat dikontekstualisasikan dengan latar Yogyakarta.

Penelitian ini mencakup studi literatur untuk memahami latar belakang kekerasan-kekerasan yang ada. Selain itu, digunakan juga metode penelitian sejarah yang mencakup proses pencarian sumber, kritik sumber, dan interpretasi. Sumber-sumber primer yang digunakan mencakup arsip koran dan foto.

Menuju Kekerasan

Kekerasan yang ada tidak terjadi dalam suatu vakum. Ia berkaitan erat dengan dinamika kehidupan yang melatarbelakanginya. Maka, untuk memahami peristiwa ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab: Bagaimana atmosfer kehidupan di Yogyakarta menuju Revolusi? Seperti apakah kelompok Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta? Bagaimana hubungan kelompok Tionghoa dengan kelompok lain di Yogyakarta saat itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjelaskan keunikan Yogyakarta sebagai tempat munculnya konflik.

Yogyakarta Menuju Revolusi

Pada masa Penjajahan Jepang, atmosfer di Yogyakarta berubah. Sebelumnya, pemerintahan Belanda bergaya tenang, praktis, dan borjuis. Terdapat wibawa yang dipertahankan dengan supremasi kulit putih, rasionalisme, dan kehebatan teknologi. Namun, ketika militer Jenderal Imamura menang pada 1942, atmosfer tersebut berubah. Nilai-nilai dalam militer dan imperial Jepang, serta ideologi perwira yang keras dan radikal, menggantikannya dengan nilai-nilai kekuatan batiniah, mitos kejayaan Timur, mitos berani mati. Pada masa Belanda, pejuang hanyalah anggota-anggota hina dalam tentara sewaan. Namun, pemujaan terhadap semangat masa Jepang membuat para pejuang yang tanpa pamrih dan serba berani dilihat sebagai penjamin kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat (Anderson, 2018).

Atmosfer tersebut dinamakan gaya Kabuki. Ia adalah percampuran antara upacara-upacara yang memesona, disiplin militer, dan kekerasan yang ditampilkan di publik. Maka dari itu, zaman Penjajahan Jepang ditandai dengan berbagai parade, peringatan hari

besar yang fantastis, siaran yang berkobar-kobar, olahraga massal, dan penyebaran semboyan penggelora semangat. Nilai-nilai tersebut disebarkan lewat berbagai pendidikan dan organisasi militer yang dibentuk Jepang. Selama ia berkuasa, Jepang menutup semua lembaga pendidikan Barat. Lembaga-lembaga ini digantikan dengan pusat pendidikan tertentu. Salah satunya adalah Pembela Tanah Air (PETA) yang berdiri pada 1943 (Benda, 1983) PETA merupakan pasukan gerilya bantuan yang terdesentralisasi, beranggotakan sekitar 500–600 orang, dan tersebar sebagai pertahanan lokal semisal sekutu menyerang Jawa.

Jepang menggunakan disiplin yang keras untuk mempersiapkan pemuda-pemuda ini. Para pemuda yang dilatih menganggap latihan itu penting. Nilai-nilai Jepang memberikan alasan untuk merasionalisasi latihan tersebut. Soehoed (2018) menjelaskan:

Kemenangan atau kekalahan itu tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya tenaga tentara. Tentara yang mempunyai roh perjuangan yang menjala-njala, lagi sempurna latihannya, selamanya dapat mengalahkan musuh, meskipun tenaga tentara yang berkurang.... Demikianlah ditanamnya pengertian tentang semangat roh keperadjuiran sebagai salah satu sifat yang terpenting untuk seorang prajurit.

Selain itu, organisasi tersebut memberikan ruang bagi nasionalisme untuk tumbuh. Pelatihan ideologi meningkatkan kesadaran politik nasionalis anggota-anggotanya. Soehoed (2018) juga bercerita mengenai masa ketika ia ditanya oleh pelatih Jepang tentang dari mana asal senjata mereka. Pelatuhnya menjelaskan:

Sendjata-sendjata ini asal dari rakjat Indonesia, hasil keringat rakjat Indonesia yang diperas oleh Belanda dan dipergunakan untuk menindas rakjat itu kembali. Sekarang sendjata-sendjata ini dikembalikan kepada putera-putera Indonesia sendiri, untuk dipergunakan guna membela rakjat dan Tanah Air. Karena itu pergunakanlah sebaik-baiknya, djangan sampai mengetjewakan kepertjajaan rakjat yang telah dilimpahkan kepada putera-puteranja.

Oleh karena itu, terjadi pemusatan kekuatan-kekuatan militer dan rasa nasionalisme dalam organisasi-organisasi bentukan Jepang. Tak heran menurut Anderson, bagi Belanda, masyarakat Indo, dan Tionghoa, kata “pemuda” yang sebelumnya “biasa saja” mendadak mendapatkan kesan yang menakutkan dan kejam.²

Gerakan-gerakan massa hanya perlu turun dari panggung sandiwara untuk memasuki kenyataan hidup sehari-hari. Rapat-rapat umum simbolis menentang imperialisme dan penindasan kolonial hanya perlu meninggalkan lapangan olahraga untuk lalu

² Lihat David Whel, *The Birth of Indonesia* (London, 1948), Bab 2; I.J. Brugmans, et al., eds., *Nederlandsch Indie onder Japanse bezetting: Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945* (Franeker, 1960), hlm 590.; H.J. van Mook, *The Stakes of Democracy in Southeast Asia* (New York, 1950), hlm 146-154.

menghambur ke jalan-jalan raya. Upacara solidaritas dengan Kerajaan Jepang tinggal mengubah tujuan pengabdian mereka. Pengorbanan diri, persaudaraan, dan kepahlawanan tinggal diberi kesempatan-kesempatan konkret untuk mewujudkan. Kekerasan dan kematian tinggal mengalir keluar dari ruang ceramah, program radio, dan gedung-gedung bioskop untuk memasuki rumah-rumah tahanan militer, gudang senjata, dan markas-markas tentara Jepang sendiri. Suatu impian politik sudah ada; tinggal menunggu waktu pelaksanaannya saja.

Atmosfer semacam inilah yang akan dibawa hingga perjuangan mempertahankan Indonesia pada masa Revolusi. Penjajahan Jepang dengan nilai-nilai militer dan nasionalisme, serta radikalisme pemuda yang dibawanya, menciptakan suasana yang berapi-api di masa mendatang.

Hal ini bercampur dengan sifat militer Indonesia pada saat itu. Republik Indonesia merupakan sebuah bangsa yang masih dalam proses pembentukan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga militer. Mayoritas dari kelompok bersenjata Indonesia bukanlah institusi yang terorganisir secara ketat. Bahkan, ketika Indonesia merdeka, ia tidak memiliki tentara nasional. Pada 22 Agustus, Sukarno membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebuah federasi kelompok bersenjata yang belum disebut sebagai “tentara”. Pada 5 Oktober, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), institusi bersenjata yang lebih tersentralistik dibentuk. Pada awal 1946, TKR beralih nama menjadi Tentara Republik Indonesia, dan pada Juni 1947, direorganisasi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Strategi militer dan doktrin dikembangkan berlandaskan satu tujuan, yakni mengusir tentara Belanda dan mencapai “kemerdekaan” yang sesungguhnya.

Selain milisi lokal, terdapat geng kriminal yang terkadang beraliansi dengan organisasi politik bersenjata. Kelompok-kelompok ini berkontribusi sangat besar terhadap kekerasan dari pihak Indonesia. Dengan keberadaan mereka, pemimpin politik dan militer Indonesia mendapatkan kambing hitam atas kejahatan dan pelanggaran hak-hak, meskipun hal tersebut dilakukan oleh TNI.

Oleh karena itu, periode revolusi merupakan masa yang dipenuhi semangat nasionalisme yang meletup-letup. Sebagai negara baru, konsepsi kewarganegaraan mulai dipikirkan. Berbagai kelompok dengan berbagai kepentingan mulai memikirkan peran dan posisi mereka dalam negara ini. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang termiliterisasi, tentara nasional yang cenderung baru, dan kelompok-kelompok milisi lokal, semi-militer, serta geng kriminal di tengah-tengahnya. Kondisi ini memberikan latar bagi kekerasan untuk terjadi.



Figur 1. Tentara Republik di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Sumber: Nationaal Archief.

Tionghoa di Yogyakarta

Pada 1835, Belanda menerapkan sistem zona ‘wijkenstelsel’ yang melarang orang Tionghoa untuk tinggal di luar pecinan. Orang Tionghoa di Yogyakarta pun dapat dikategorikan sebagai masyarakat urban karena banyak yang tinggal di daerah kota. Kemudian pada 1919, Belanda mencabut kebijakan tersebut. Akibatnya, terjadi perpindahan ke pinggiran kota. Namun, menurut sensus 1930, mayoritas Tionghoa—sebanyak 70 persen—masih tinggal di daerah kota. Banyak yang memilih menetap di kota karena akses fasilitas yang lebih mudah (Kwartanada, 2002: 258).

Tabel 1. Populasi Yogyakarta pada 1930

Area	Indonesia*	Eropa	Tionghoa	T i m u r A s i n g Lainnya	Total
Kota Yogyakarta %	121,979 89,3	5,593 4,1	8,913 6,5	164 0,1	136,649 100
Kesultanan Yogyakarta %	1,538,868 98,7	7,317 0,5	12,640 0,8	202 -	1,559,027 100

*Indonesia di sini merujuk kepada apa yang disebut Belanda sebagai “inlanders”

Sumber: (Kota) Volkstelling 1930, II (1933), hlm. 148-9, 160; (Kesultanan) Volkstelling 1930, II (1933), hlm. 138-9, 158; Volkstelling 1930, VIII (1936), hlm. 65 dalam Kwartananda (2002).

Komunitas Tionghoa di Yogyakarta juga bersifat heterogen. Mayoritas Tionghoa di Yogyakarta merupakan kelompok Hokkien, disusul oleh Kwongfu (Kanton) dan Hakka.

Tabel 2. Populasi Tionghoa pada 1930 di Yogyakarta berdasarkan kelompok dialek

Kelompok Dialek	Kesultanan Yogyakarta			Kota Yogyakarta		
	L	P	Total	L	P	Total
Hokkien	4,579	3,273	7,852	3,131	2,391	5,522
Kwongfu (Kanton)	723	355	1,078	618	308	926
Hakka	162	79	241	134	69	203
Tiochiu	81	60	141	43	25	68
Yang lainnya	1,402	1,326	2,728	916	958	1,864
Orang Indonesia*	2	525	527	1	292	293**
Tidak Diketahui	29	41	70	16	21	37
Total	6,978	5,659	12,637	4,859	4,054	8,913

* Pada 1930, terdapat 527 orang Indonesia yang dihitung sebagai “Tionghoa” di Kesultanan Yogyakarta. Kebanyakan adalah perempuan dan hampir pasti istri atau selir dari laki-laki Tionghoa. Dari angka tersebut, 508 adalah orang Jawa dan sisanya tidak diketahui.

** Tidak secara spesifik disebut sebagai “pribumi” di dalam sumber, hanya ditulis sebagai “bukan Tionghoa”.

Sumber: *Volkstelling 1930*, VII (1935), hlm. 287, 304 dalam Kwartananda (2002).

Dari segi ekonomi, komunitas Tionghoa di Yogyakarta sering kali bekerja dalam perdagangan dan industri. Pada 1934, sumber Belanda menyatakan bahwa jenis perdagangan ini mencakup 1) kleinhandel, atau perdagangan skala kecil di pasar atau warung, 2) marskramershandel, pedagang keliling yang mayoritas menggunakan sepeda, 3) groothandel, perdagangan skala besar, terutama dalam bidang produk agrikultur, 4) tusschenhandel, perdagangan skala menengah dengan komoditas yang bervariasi, tetapi mayoritas produk agrikultur dan peternakan, 5) middenstandhandel, atau perdagangan kelas menengah, mencakup

warung dan toko besar, serta produk kesenian, terutama batik (de Cock, 2002: 259). Tidak banyak dari mereka bekerja kepada Pemerintah Belanda karena kebijakan diskriminatif yang mengeksklusi mereka dari pekerjaan administratif.

No.	Pekerjaan	Kota Yogyakarta			Kesultanan Yogyakarta		
		Pribu- mi	Eropa	Tiong- hoa	Pribu- mi	Eropa	Tiong- hoa
1	Produksi Bahan Mentah	-	58	38	360,282	500	199
2	Industri	-	191	916	163,379	193	1,063
3	Trans- portasi	-	184	81	6,670	196	144
4	Pedagang	-	264	1,673	55,029	286	2,859
5	Partiku- ler	-	372	94	5,086	408	104
6	Pegawai Sipil	-	455	14	17,788	487	24
7	Lainnya	-	258	103	45,381	280	141
	Total	-	1,782	2,919	653,633	2,354	4,504

Catatan: Data mengenai pekerjaan masyarakat tempatan di Kota Yogyakarta tidak tersedia

Sumber: *Volkstelling, 1930*, VI (1933), hlm. 360-3; VII *1935), hlm. 358; VIII (1936), hlm. 126-7 dalam Kwartananda (2002).

Secara kultural, kelompok Tionghoa sering dibagi menjadi dua, yakni peranakan dan totok. Pada umumnya, kelompok peranakan merujuk kepada kelompok Tionghoa dengan orientasi budaya lokal dan sering kali merupakan keturunan ayah Tionghoa dan ibu lokal. Di sisi lain, totok adalah kelompok yang berorientasi ke kebudayaan Cina dan sering kali merupakan pemukim generasi pertama. Pengelompokan ini terjadi berdasarkan sebanyak apa orang tua mempertahankan budaya Cina di dalam keluarga. Budaya berbisnis juga merupakan kriteria penting. Beberapa Tionghoa kelahiran lokal juga terkadang mengidentifikasi diri mereka sebagai totok dan mengikuti jejak totok dalam perekonomian. Kedua kelompok umumnya bersifat antagonistik satu sama lain. Masing-masing memiliki pandangan yang saling merendahkan dan prasangka yang mengakar (Kwartanada, 2002: 258)

Pada 1937, Jepang melakukan aksi militer di Cina. Akibatnya, sebanyak 466 kepala keluarga dari Cina Daratan mengajukan perizinan untuk tinggal di Yogyakarta. Populasi totok di Yogyakarta pun meningkat (Kwartanada, 2002: 259).

Di sisi lain, orang-orang Tionghoa di Jawa membentuk Tjin Tjai Hwee (Dana Amal Cina) untuk mengumpulkan donasi. Dari tabel di bawah, dapat dilihat bahwa meskipun Yogyakarta merupakan kota ke-6 terbesar di Jawa, dana yang dikumpulkan lebih sedikit dibanding kota kecil seperti Cirebon dan Surakarta. Menurut Didi Kwartananda, hal ini menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta didominasi oleh peranakan. Akibatnya, komunitas Tionghoa di Yogyakarta secara umum tidak terlalu patriotik terhadap Cina Daratan. Aksi-aksi boikot terhadap Jepang di Yogyakarta juga tidak marak dilakukan (Kwartanada, 2002: 269).

Tabel 3. Dana yang dikumpulkan oleh China Funds (1937-41)

No.	Kota	Jumlah (NFL)	No.	Kota	Jumlah (NFL)
1	Batavia	4,512,446	5	Cirebon	353,365
2	Surabaya	1,763,562	6	Surakarta	219,510
3	Palembang	1,043,788	7	Lampung	211,502
4	Bandung	1,014,111	8	Yogyakarta	148,000

Sumber: 'Fonds Amal Tiongkok', Sin Po, 14 Feb. 1942 (n.p.) dalam Kwartananda (2002).

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kelompok Tionghoa di Yogyakarta tinggal di daerah perkotaan, bersifat heterogen, bekerja dalam bidang perdagangan dan industri. Nasionalisme Cina tidak begitu marak di Yogyakarta karena kelompok Tionghoa di Yogyakarta kebanyakan

Hubungan Menuju Revolusi

Tionghoa-Jepang

Akibat perang Sino-Jepang, kelompok Tionghoa—terutama kelompok totok yang lebih patriotik terhadap Cina dibandingkan peranakan—melaksanakan aksi-aksi boikot. Pada 1927, polisi politik Belanda melaporkan bahwa terdapat boikot dan aksi teror taktis terhadap toko-toko Tionghoa yang menjual produk Jepang, seperti pencoretan dan pelemparan kotoran manusia di pintu toko. Konsul Cina, Ling Go Wang pada 1928 dan Fartsan Tsung pada 1933 juga mendiseminasi propaganda anti-Jepang ketika mereka sampai di Yogyakarta. Media-media, seperti Bintang Mataram, Kiao Seng, dan Sin Po, memberitakan konflik tersebut secara intensif (Kwartanada, 2002: 268).

Setelah Jepang mengokupasi Yogyakarta, mereka menangkap 36 figur yang diketahui telah berpartisipasi dalam gerakan anti-Jepang, seperti Liem Ing Hwie, Dr. Yap Hong Tjoen, Sie Kee Tjie, Tjie Tjing Ing, dan Oei Tik Kie. Kemungkinan otoritas Jepang mendapatkan nama-nama mereka dari nasionalis Indonesia anti-Tionghoa atau mantan anggota polisi rahasia Hindia Belanda.

Namun, setelah perubahan kekuasaan, masyarakat Tionghoa mencoba untuk mengambil posisi yang kooperatif. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah penangkapan orang Tionghoa di Yogyakarta, yakni 5 dari 536. Padahal, jumlah penduduk Tionghoa di Yogyakarta cukup tinggi (Kwartanada, 2002: 258). Pemimpin-pemimpin yang sebelumnya anti-Jepang, terutama pengusaha peranakan, memilih berkolaborasi. The Hong Oe, mantan pemimpin dari Tjin Tjai Hwee dan seorang pengusaha peranakan, menjadi pemimpin Hua Chiao Chung Hui (HCCH).³ Tjie Tjing Ing, seorang pengusaha batik dan mantan pemimpin perkumpulan rahasia Hoo Hap, bekerja sebagai propagandis HCCH. Ang Ping Gwan, pemimpin totok terkemuka dari cabang lokal Guomintang, Partai Nasionalis Tiongkok, ditempatkan sebagai penerjemah di kantor Kempeitai (Polisi Militer Jepang) karena kemampuan bahasanya. Liem Ing Hwie, pemimpin Tionghoa yang paling menonjol, dipaksa oleh Jepang untuk mengurus mesin-mesin yang digunakan di perkebunan kapas, karena ia adalah seorang insinyur mesin yang berpengalaman (Kwartanada, 2002: 271).

Kolaborasi-kolaborasi ini terjadi karena pertama, kelompok Tionghoa merupakan ‘middleman minority’, sebuah kelompok asing yang kuat secara ekonomi tetapi tidak memiliki kekuatan politik. Mereka dapat menjadi target kemarahan penduduk tempatan. Maka dari itu, mereka perlu memiliki hubungan dengan kelompok yang berkuasa pada saat itu untuk alasan keamanan. Kedua, dengan konflik yang muncul antara masyarakat tempatan dan kelompok Tionghoa, mereka merasa masyarakat tempatanlah yang perlu mereka takutkan dan bukan Jepang. Ketiga, Jenderal Imamura juga memiliki sikap yang cukup suportif dengan kelompok Tionghoa karena ia memilih untuk memanfaatkan mereka.

Tionghoa-Belanda

Setelah Nazi menginvasi Belanda pada Mei 1940, beberapa orang Tionghoa secara aktif berpartisipasi dalam gerakan pro-Belanda. Dr. Yap Hong Tjoen menjadi ketua dari Prins Bernhard Fonds dan Spitfire Fonds yang mengumpulkan dana untuk membeli pesawat tempur udara Spitfire. Beberapa orang Tionghoa juga ikut serta dalam mobilisasi rakyat Belanda. Hal-hal ini dilakukan bukan hanya karena hubungan Tionghoa-Jepang yang kurang baik, melainkan juga citra Jepang sebagai kelompok berbahaya setelah pengeboman Pearl Harbour (Kwartanada, 2002: 270).

Di Yogyakarta, setelah pengumuman dari Gubernur Jenderal Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, Liem Ing hwie, seorang perwakilan dari Siang Hwee (Kwartanada, 2002: 262), menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Setelahnya, NIROM, stasiun radio

³ Organisasi bentukan Jepang yang bertujuan untuk menyatukan organisasi-organisasi Cina.

nasional Belanda, menyiarkan lagu kebangsaan Cina, Sanmin Zhuyi. Hal ini meninggalkan kesan yang membekas kepada para penduduk Tionghoa. Pada 11 Desember 1941, Gubernur Adam memberikan pidato di depan berbagai kelompok, termasuk kelompok Tionghoa, meminta mereka untuk berpartisipasi secara aktif untuk melindungi Hindia-Belanda dari invasi Jepang. Ia juga meminta pemilik toko Tionghoa di Malioboro secara spesifik untuk memperbolehkan tentara berlindung di toko mereka (Kwartanada, 2002: 270).

Selain itu, terdapat kolaborasi-kolaborasi lain dari kelompok Tionghoa. Berdasarkan inisiatif dari Siang Hwee, kelompok Tionghoa membentuk pertahanan diri sipil yang disebut *Chineesche Burgerfront Organisatie* (CBO) pada 30 Desember, yang dipimpin oleh Liem. CBO memiliki empat bagian yang bertanggung jawab untuk (i) propaganda, (ii) membantu pekerjaan polisi, (iii) kegiatan kesejahteraan sosial seperti mengatur makanan dan bantuan medis untuk orang miskin dan tunawisma, dan (iv) perlindungan serangan udara, pemadam kebakaran, dan pertolongan pertama. Lebih lanjut, sekelompok wanita Tionghoa bertugas sebagai perawat dalam kelompok pertahanan rumah wanita yang disponsori Belanda, COVIM (*Commissie voor de Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd*). CBO mengumpulkan 5.000 NFL dalam waktu dua hari dan pemerintah Belanda memberikan apresiasi (Kwartanada, 2002: 278).

Kedekatan dan pembentukan CBO ini menarik perhatian kelompok nasionalis Indonesia. Mereka memandang badan tersebut sebagai simbol kolaborasi antara kelompok Tionghoa dan Belanda. Bagi banyak kelompok nasionalis, Jepang akan datang sebagai pembebas. Di sisi lain, siapapun yang berhubungan erat dengan Belanda adalah musuh, dalam kasus ini, kelompok Tionghoa totok.

Tionghoa-Republik

Ketika Jepang membentuk organisasi multi-etnis, Gerakan 3A, kelompok totok, peranakan, dan Arab tertarik untuk berpartisipasi. Namun, kelompok Indonesia tidak ingin dikelompokkan dengan keturunan asing. Maka dari itu, Jepang membentuk setiap kelompok etnis organisasinya masing-masing. Untuk Tionghoa, dibentuk *Hua Chiao Tsung Hui* (HCTH). Pada 8 Mei 1942, ketua dari 10 organisasi Tionghoa dikumpulkan dalam suatu rapat.⁴ Tsuda Fumio, staf dari *Sendenbu* Yogyakarta, menyatakan bahwa Jepang menginginkan

4 (i) *Hoa Kiao Societeit* Mataram, sebuah perkumpulan rekreasi (ii) *Hua Chiao Tsing Nien Hui*, sebuah organisasi pemuda yang berbasis di sekolah-sekolah Tionghoa (iii) *Hoo Hap Hwee Koan*, sebuah organisasi gotong royong (iv) *Hiap Gie*, sebuah perkumpulan pemakaman (v) *Pak Hoo Tong*, juga sebuah perkumpulan pemakaman (vi) *Chung Hsioh*, sebuah perkumpulan untuk para siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda (vii) *Ai Shung Chi*, sebuah kelompok olah raga (viii) *Rukun Kampung Tionghoa Tugu*, sebuah organisasi gotong royong (ix) *Kong Khauw Hwee*, sebuah badan keagamaan (x) *Tiong Hoa Hwee Koan*, sebuah perkumpulan pendidikan.

menginginkan semua organisasi yang ada untuk dileburkan menjadi satu institusi yang merepresentasikan komunitas Tionghoa. Dalam propaganda HCTH, dituliskan:

. . . karena keinginan Administrasi Militer Jepang untuk menyatukan semua bangsa Asia, maka tidak mengherankan jika melihat munculnya organisasi Tionghoa yang tidak didasarkan pada prinsip 'peranakan untuk peranakan' dan 'totok untuk totok'. Semua kelompok sekarang bergabung bersama di dalam HCTH, sebuah pusat bersama untuk orang Cina yang tidak hanya menyatukan orang Cina tetapi juga menyediakan cara untuk menawarkan semua sumber daya manusia masyarakat kepada pemerintahan Jepang untuk mencapai Asia Timur Raya (Sinar Matahari, 15 Januari 1943).

Kelompok inilah yang akan menjadi Chung Hua Tsung Hui (CHTH) setelah kekalahan Jepang. CHTH menyatakan bahwa tujuannya adalah menyatukan orang Tionghoa untuk meningkatkan posisi ras Tionghoa, mempromosikan kemakmuran dan kesejahteraan, dan membuat pengaturan untuk bekerja sama dengan kelompok dan organisasi lain. Maka dari itu, organisasi ini menjadi penghubung komunitas Tionghoa dengan Republik Indonesia. Di Yogyakarta, pada 2 Januari 1946, pemimpin-pemimpin CHTH mengadakan kontak-kontak bersahabat dengan pemerintah lokal. Beberapa dari mereka melakukan pertemuan dengan Sultan Hamengku Buwono IX, Paku Alam VIII, dan Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk menjalin ikatan (Kwartanada, 2002: 71). Tionghoa-Republik

Namun, dalam tatanan akar rumput, hubungan tidak selalu harmonis. Terdapat kompetisi sengit dalam aspek ekonomi. Pada 1932, Gubernur van Gesseler Verschuur menyebutkan 3 pebisnis agrikultur Jawa dari Yogyakarta yang substansial, yakni Soeroredjo, Martosentono, dan Djiwokarijo (Kwartanada, 2002: 259). Namun, hanya Soeroredjo, dengan pengalaman bekerja di perusahaan Tionghoa, yang berhasil bertahan dari kompetisi dengan pedagang Tionghoa. Kompetisi terjadi di berbagai bidang. Dengan begitu, para nasionalis mulai khawatir akan pasar yang didominasi Tionghoa (Kwartanada, 2002: 266).

Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor dari aksi-aksi kekerasan terhadap Tionghoa pada masa peralihan dari Belanda ke Jepang. Dalam memoarnya, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menyatakan bahwa setelah ia sampai di Jawa Barat, beberapa orang Tionghoa melaporkan bahwa toko-toko mereka telah dijarah setelah kejatuhan kekuasaan Belanda. Kekerasan-kekerasan ini mengejutkan karena kelompok Tionghoa menganggap hubungan mereka dengan kelompok masyarakat tempatan harmonis, sehingga kekerasan tidak diantisipasi dalam masa peralihan tersebut (Twang, 1998: 72) Kelompok religius dan nasionalis yang radikal juga bukanlah kekuatan

yang signifikan di Yogyakarta sebelumnya. Hanya terdapat organisasi nasionalis moderat dengan fokus kejawaan dan organisasi religius moderat seperti Muhammadiyah dan Partai Islam Indonesia yang memainkan peran dominan.

Salah satu tugas polisi militer Jepang adalah untuk mengembalikan ketertiban. Itu menjadi alasan mereka tidak menyetujui kekerasan anti-Tionghoa. Jenderal Imamura juga menyatakan bahwa kelompok Tionghoa dapat meminta bantuan Jepang jika “kehidupan (mereka) terancam oleh kelompok masyarakat tempatan” (Kwartanada, 2002: 70). Dengan begitu, kelompok Tionghoa mulai merasa bahwa bukan Jepang yang perlu mereka takuti, melainkan para masyarakat tempatan (Goan, 1945: 20–25).

Perlu dicatat bahwa kekerasan ini tidak merepresentasikan posisi Republik Indonesia. Pemerintah Republik tidak menyetujui aksi anti-Tionghoa ini. Pada 14 September 1948, CHTH seluruh republik berkumpul di CHTH Yogyakarta, dikunjungi oleh Presiden Sukarno, menteri penerangan, menteri kemakmuran, Wk. Konsul New Shu Chun, dan orang-orang Tionghoa terkemuka. Dalam pidatonya, Sukarno menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha menjamin dan melindungi keamanan penduduk Tionghoa. Ia juga menyatakan bahwa sebagai langkah nyata, pemerintah akan mempertinggi keamanan penduduk dengan menghidupkan kembali rukun-rukun tetangga di seluruh daerah yang masih dikuasai Republik (Hariwarta, 8 Agustus 1948). Selain itu, kelompok Tionghoa merupakan salah satu kelompok yang diundang oleh Sultan ketika mendapatkan berita Proklamasi Kemerdekaan. Dalam pertemuan itu, Sultan menyampaikan pesan bahwa mereka harus berjaga-jaga sehingga tidak terjadi kerusuhan di Yogyakarta.

Dapat dilihat bahwa hubungan pada masa menuju Revolusi sangatlah kompleks. Namun, secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat bibit-bibit kekerasan dikarenakan hubungan Tionghoa-Belanda yang dianggap dekat oleh kelompok nasionalis. Selain itu, kompetisi ekonomi di Yogyakarta cukup sengit dan kelompok nasionalis telah mengungkapkan kekhawatiran akan posisi Tionghoa dalam pasar.

Kasus-Kasus Kekerasan

Meskipun Pemerintah Republik dan Sultan telah menjamin keamanan masyarakat Tionghoa, kekerasan tetap terjadi pada masa Revolusi. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang relatif aman bagi kelompok Tionghoa dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa. Sering kali, ia menjadi tempat tujuan pengungsian dari berbagai daerah. Namun, ini bukan berarti tidak ada kekerasan yang terjadi.

Selain cerita mengenai pengalaman Yong Tjie Fong, terdapat kasus-kasus lain. Pada 24 Desember 1948, gedung CHTH Yogyakarta

dipenuhi oleh pengungsi-pengungsi dari Prambanan, Salam, dan Muntilan. Terdapat 200 pengungsi dari Prambanan yang diangkut dengan truk-truk militer Belanda. Ketika Yogyakarta dan Solo diduduki oleh tentara Belanda, sikap masyarakat tempatan mulai berubah. Konvoi-konvoi militer Belanda yang datang dari jurusan Solo maupun Yogyakarta sempat berhenti di Prambanan. Di antara mereka, terdapat tentara Belanda yang meminta keterangan dari penduduk Tionghoa. Tentara Indonesia pun menjadi marah dan menganggap bahwa masyarakat Tionghoa telah memberikan bantuan kepada tentara Belanda. Dikatakanlah bahwa mereka adalah kaki-tangan Belanda. Masyarakat Tionghoa akhirnya diancam untuk diungsikan agar tidak dapat mengadakan perhubungan dengan tentara Belanda. Mereka pun memilih untuk mengungsi dengan tentara Belanda. Mereka diangkut dengan truk-truk. Rumah-rumah mereka diserbu setelah mereka meninggalkan Prambanan. Pengalaman tersebut serupa dengan pengungsi-pengungsi dari Muntilan (Sin Po, 31 Desember 1948).

Kwa Hong Bing, penduduk Tempel yang kebetulan berada di Yogyakarta, mendengar bahwa terdapat penyingkiran 200 masyarakat Tionghoa satu jam setelah tentara Belanda memasuki wilayah tersebut. Aksi ini dilakukan oleh “pemuda yang bersenjata bambu runcing”. Namun, ketua CHTH tidak berupaya untuk memperlambat penyingkiran tersebut. Pada 25 Desember 1948, sebagian pengungsi tersebut ditemukan di Desa Belumbang. Mereka dipencar di berbagai desa. Mereka ditemukan oleh Kwa Hong Bing yang berangkat dengan beberapa tentara Belanda dan sejumlah tank. Sesampai mereka di Belumbang, mereka bertanya kepada seorang petani, lalu menemukan para pengungsi di satu rumah dengan kondisi yang “sangat menyedihkan”. Masih terdapat 40 penduduk Tionghoa yang belum dapat ditemukan (Sin Po, 31 Desember 1948).

Terdapat pula perampokan “kaum tani dan golongan hartawan” di Kota Gede. Beberapa mayat ditemukan di tempat-tempat tertentu. Namun, kota tersebut kosong setelahnya. Kebanyakan dari mereka mengungsi ke Imogiri (Sin Po, 31 Desember 1948).



Figur 2. Pengungsi dari Bantul yang dibawa ke Kota Yogyakarta oleh tentara Belanda Sumber: Nationaal Archief

Pada 31 Desember 1948, diberitakan bahwa penduduk Tionghoa di Bantul telah hilang (Sin Po, 31 Desember 1948). Ternyata, 500 orang Tionghoa tersebut telah diangkut oleh tentara Republik. Mereka lalu dikumpulkan di suatu sekolah. Namun, tentara Belanda datang dan membawa mereka ke Yogyakarta.⁵

Kasus-Kasus Kekerasan

Seperti yang dibahas sebelumnya, Yogyakarta adalah kota dengan penduduk Tionghoa yang mayoritas peranakan. Kelompok ini ditandai dengan penguasaan bahasa tempatan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di markas kepada Yong Tjie Fong dan orang-orang Tionghoa lainnya merupakan salah satu upaya untuk memilih target. Ia menunjukkan siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi target kekerasan. Dalam kasus ini, dapat diprediksi bahwa target kekerasan merupakan kelompok Tionghoa totok. Gelombang migrasi kelompok totok pada 1937 dapat menjadi hal yang mencolok di tengah-tengah populasi Tionghoa Yogyakarta yang peranakan. Bibit-bibit konflik seperti kesenjangan ekonomi dan keberpihakan politik yang cenderung identik dengan Tionghoa totok dapat melandasi aksi tersebut.

Selain itu, kasus-kasus pengungsian dari Prambanan dan Muntilan menunjukkan bahwa agresi muncul akibat anggapan atas ambivalensi keberpihakan politik. Masyarakat Tionghoa pada saat itu memiliki stigma sebagai kelompok yang dekat dengan Belanda. Dengan kehadiran tentara-tentara Belanda yang berhenti untuk bertanya kepada penduduk sekitar, pandangan tersebut dapat dengan mudah dipandang sebagai salah satu bentuk kolaborasi. Dengan atmosfer nasionalisme yang tinggi dan keberadaan tentara Indonesia yang saat itu bertujuan mengusir tentara Belanda, pandangan itu cukup untuk mengundang amarah.

Kekerasan yang berlandaskan faktor ekonomi juga terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus perampokan-perampokan di Kota Gede dan kekerasan yang terlibat di dalamnya. Masa Revolusi yang menjadi masa transisi memberikan latar bagi kemunculan kekerasan-kekerasan ini.

Kekerasan juga terjadi dalam kasus-kasus “pengungsian”. Pengungsian merupakan hal yang cukup lumrah dilakukan pada Masa Revolusi, ketika terdapat kemungkinan adanya konflik terbuka dan masyarakat perlu dipindahkan. Kata “pengungsian” tersendiri memiliki konotasi yang baik.⁶ Namun, bukan berarti pengungsian selalu berujung kepada keamanan mereka yang diungsikan. Dalam memorandum

⁵ DLC Liberation of Bantool Chinese and Their Evacuation to Djokja, 12 Dec 1948, 2.24.04.03, 15098, Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië, Nationaal Archief, The Hague.

⁶ Menurut KBBI, ia dimaknai sebagai aksi penghindaran (penyingkiran) diri dari bahaya atau penyelamatan diri (ke tempat yang dirasa aman).

CHTH mengenai kekerasan terhadap kelompok Tionghoa pada masa Revolusi, dituliskan:

Mereka dipenjara, diinternir atau ditangkap tanpa alasan apa pun. Mereka sering diusir dari tempat tinggalnya dan digiring ke hutan atau tempat yang jauh atau penjara tanpa diberi makan. Faktanya, orang Tionghoa yang sekarang tinggal di wilayah Republik seperti sandera yang tidak berani bergerak atau berbicara karena takut dibunuh, diculik, atau dipenjara. Ketika seorang Tionghoa diculik, dia hanya memiliki kesempatan yang sangat tipis untuk dibebaskan. Ketika dia dibunuh, mayatnya akan menghilang.⁷

Selain itu, salah satu artikel kolom komentar Sin Po juga menuliskan bahwa berdasarkan pengalaman yang ada, orang-orang yang dibawa mengungsi tidak jarang sebagian atau seluruhnya dibunuh (Sin Po, 30 Desember 1948).

Penggambaran ini membuat “pengungsian” lebih tepat dimaknai sebagai campuran dari penculikan, penyanderaan, dan pembunuhan. Ini membuat penggambaran terhadap pengungsi-pengungsi dari Tempel yang dikumpulkan di suatu rumah di Blambangan—yang disebut berada dalam “kondisi menyedihkan”—akurat.

Pelaku-pelaku dari kekerasan ini juga beragam. Dalam sumber tertentu, digunakan terma “algodjo”. Mereka digambarkan sebagai masyarakat tempatan yang membunuh menggunakan bayonet dan pedang. Terdapat juga pemuda dengan bambu runcing dan tentara Indonesia. Keragaman ini menggambarkan adanya sentimen yang berasal dari berbagai kelompok, tidak hanya tentara Republik. Dalam lanskap militer Yogyakarta pada saat itu, kelompok-kelompok yang aktif juga bervariasi, mulai dari tentara, milisi lokal, hingga geng kriminal.

Kebanyakan kasus terjadi di daerah pinggiran Yogyakarta, seperti Bantul, Prambanan, Imogiri, Kota Gede, dan Muntilan. Korban-korban ini kebanyakan diungsikan ke daerah kota. Kemungkinan, ini dikarenakan Sultan dan pemerintah Republik telah mengutarakan kesediaan mereka untuk memberikan perlindungan. Daerah kota lebih dekat dengan kekuasaan Sultan dan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut lebih mudah untuk ditegakkan.

Musuh dan Sekutu: Pandangan Masyarakat Tionghoa

Dengan terjadinya kasus-kasus kekerasan, masyarakat Tionghoa mulai membentuk ide mengenai siapa yang dianggap musuh dan sekutu. Pandangan mengenai Republik dan Belanda sangat dipengaruhi oleh

⁷ Chung Hua Tsung Hui, Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947, 7.

kasus-kasus tersebut.

Setelah maraknya kasus, pandangan kelompok Tionghoa terhadap Republik memburuk. Terdapat kekecewaan besar. Sebagaimana tertulis dalam kolom komentar Sin Po:

Doeloe boeat itoe peristiwa-peristiwa jang manjedihkan orang bisa dimpahken sebagian jang terbesar tanggoengan djawab pada pamerentah Repoeblik. Bagimana sekarang? Pamerentah Repoeblik practisch soeda tida ada lagi. Pembesar-pembesar Repoeblik jang soeda tida pegang kakoeasaan, tida bisa mamerentah, nistjaja tjoema bisa angkat poendak. Siapa jang haroes bertanggungdjawab bagi semoea pemboenoehan, perampokan, penjoelikan, paksaan mengoengsi, pembakaran dan sebagianja boeat karoeagiannja pendoedoek Tionghoa? (Sin Po, 30 Desember 1948).

Republik dan masyarakat tempatan dipandang sebagai kelompok yang berbahaya karena masyarakat Tionghoa mengalami persekusi yang lebih serius ketimbang pada masa penjajahan Jepang. Ketakutan juga muncul ketika Mayor-Jenderal Soetomo memperingatkan para masyarakat Tionghoa yang tinggal di daerah kekuasaan Belanda melalui radio Yogyakarta bahwa “ratusan ribu saudara-saudara mereka masih hidup di bawah rezim Republik Indonesia”.⁸

Pandangan tersebut terlihat jelas dari pemberitaan media Tionghoa terhadap tentara Indonesia. Sin Po menuliskan:

Kaoem tani dan pendoedoek desa menderit sanget heibat kerna perboeatannja bangsanja sendiri. Kaoem tani dan pendoedoek desa dipaksa menjerahken barang makanannja dan diwadjibken masak oentoek kaperloean tentara. Semoea boeah-boeahan dan daon-daon dari papoehoenan jang bisa dimakan moesti dipetik dan diserahkan kapada tentara oentoek persediaan makanannja. Desa-desa jang sekarang didjadien poesat pertahanan tentara Indonesia, pendoedoeknja ngalamken penderitaan heibat. Rasa tida soeka terhadap tentara sekarang kaliatan moelai meloeas, hingga ada kamoengkinan jang perhoeboengan antara kaoem tani dan pendoedoek desa di satoe fihak dengan tentara repoeblik di lain fihak, bisa djadi tambah genting (Sin Po, 31 Desember 1948).

Tidak adanya respons dari pemerintah⁹ membuat masyarakat Tionghoa putus asa. Mereka pun beralih kepada Belanda. Sebagaimana ditulis di kolom komentar Sin Po:

Dalem keadahan seperti sekarang Hoakiauw nistjaja tida bisa laen dari anggep bahoea pamerentah Blanda heroes bertanggungdjawab. Dari itoe Hoakiauw aken merasa perloe minta dengan lebih keras dari doeloe pada pamerentah Blanda soepaja keslametannja Hoakiauw di saloeroe Djawa dan Sumatra didjamin sebagaimana

⁸ Chung Hua Tsung Hui, Memorandum Outlining Acts, 7.

⁹ Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947, 6.

moestinja ... soepaja Hoakiau w jang tinggal dalem desa-desa dimana tida bisa ditempatin tentara lekas diangkoet ka tempat jang lebih slamet, dan soepaja orang-orang jang dioengsiken lekas ditjari sampe dapet dimerdikaken lagi (Sin Po, 30 Desember 1948).

Dalam pemberitaan kebanyakan kasus, Belanda dianggap sebagai sekutu. Sering kali ketika pengungsian terjadi, tentara-tentara Belandalah yang dihubungi untuk membantu. Hal ini dapat dilihat dari kasus di Bantul, ketika tentara Belanda merebut pengungsi yang ditawan tentara Republik ke Yogyakarta. Hal serupa terjadi di Prambanan, ketika tentara Belanda membawa masyarakat Tionghoa ke Yogyakarta setelah mendapatkan ancaman dari tentara Republik. Selain itu, ketika tidak ada gedoran besar-besaran, penculikan, maupun teror di Prambanan, masyarakat Tionghoa beranggapan bahwa ini adalah akibat dari ketakutan tentara Republik atas diketahuinya aksi mereka oleh tentara Belanda karena muncul pada siang hari (Sin Po, 31 Desember 1948).

Ketika masyarakat Tionghoa di Tempel disingkirkan, Sin Po mengabarkan:

Orang merasa manjesel jang Ketoea C.H.T.H di sana waktoe trima prentah boeat mengoempoelken pendoeboek Tionghoa oentoek dioengsikan, tida bisa tjari daja-oepaja oentoek melambatkan penjingkiran itoe. Begitoe poen koetika tentara Blanda masoek di Tempel dan menanjaken tentang keadahannja pendoeboek Tionghoa, ketoea C.H.T.H. jang ternjata tida ikoet dioengsiken tida maoe memberiken katerangan kaloe pendoeboek Tionghoa baroe sadja disingkirken, hingga kaloe itoe ketones minta bantoeannja tentara Blanda boeat meneloeng, tentoe masi bisa direboet kembali dari tangannja orang-orang Indonesia kerna jang menggiring marika itoe hanja bebrapa pamoedan jang bersendjata bamboe roentjing.¹⁰

Sebagaimana tertulis dalam Sin Po, masyarakat Tionghoa memandang keberadaan tentara Belanda sebagai simbol keamanan. Hal ini menyebabkan pengharapan masyarakat Tionghoa secara otomatis berkontradiksi dengan tujuan Republik yang ingin mengusir tentara Belanda:

...soepaja tempat-tempat dimana ada pendoeboek Tionghoa bila soeda didoeboek oleh tentara Blanda heroes didoeboek teroes oleh itoe tentara sampe kaslametan pendoeboek di itoe tempat betoel-betoel terdjamin...(Sin Po, 30 Desember 1948).

Karena kegagalan pemerintah dalam menjamin keamanan di berbagai tempat, bagi kelompok Tionghoa, keamanan dapat diperoleh dengan penguasaan Belanda terhadap suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah terjadi, seperti bagaimana terdapat beberapa bantuan dari Belanda, salah satunya adalah pengiriman dana kepada CHTH (De Nederlander, 30 Agustus 1947). Kegagalan Republik juga memberi

10 Memorandum Outlining Acts of Violence, 6.

justifikasi bagi tentara Belanda untuk “mempertahankan ketertiban”

Konklusi

(Algemeen Handelsblaad, 30 Agustus 1947). Hal ini dapat menjelaskan ambivalensi keberpihakan dalam komunitas Tionghoa.

Meskipun Yogyakarta dikenal sebagai wilayah yang relatif aman bagi masyarakat Tionghoa, tidak berarti kekerasan tidak terjadi. Kekerasan pernah berlangsung saat perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan terjadi lagi pada masa Revolusi. Kekerasan ini muncul akibat hubungan-hubungan yang ada di Yogyakarta sebelum masa Revolusi, yakni kedekatan masyarakat Tionghoa dengan Belanda akibat sentimen anti-Jepang dan persaingan ekonomi yang ketat.

Kekerasan yang terjadi dalam berbagai kasus ditargetkan kepada Tionghoa totok, meskipun pada kenyataannya cukup banyak Tionghoa peranakan yang menjadi korban. Penargetan ini bisa jadi tidak dilakukan secara sadar, tetapi merupakan manifestasi dari tensi-tensi yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus tertentu, pembunuh membebaskan masyarakat Tionghoa yang membaaur dengan berbahasa Melayu dan Jawa, kemungkinan karena jumlah peranakan yang tinggi di Yogyakarta. Selain itu, kekerasan biasanya dilandasi kekesalan atas apa yang dianggap sebagai bentuk kolaborasi dengan Belanda oleh tentara Republik, sebagaimana terjadi di Prambanan dan Muntilan. Kekerasan juga terjadi kepada “hartawan” di Kota Gede dan pengusaha-pengusaha lainnya.

Kegagalan pemerintah Republik untuk menegakkan rasa aman di berbagai tempat memengaruhi keberpihakan masyarakat Tionghoa. Berbagai kekerasan dilakukan oleh tentara Republik, pemuda, dan masyarakat tempatan lainnya. Atas dasar keputusan ini, kelompok Tionghoa mengharap bantuan Belanda. Dalam berbagai kasus, tentara-tentara Belanda membantu pencarian pengungsi Tionghoa yang hilang dan mencegah kekerasan dilakukan oleh tentara Indonesia. Dengan begitu, sebagian besar masyarakat Tionghoa berharap agar tentara Belanda menguasai wilayah-wilayah tertentu agar terciptanya keamanan. Hal ini tentu berlawanan dengan semangat zaman pada masa itu dan tujuan yang ingin dicapai oleh Republik. Namun, kekerasan yang terjadi menjelaskan sentimen tersebut.

Referensi

Arsip Surat Kabar

Algemeen Handelsblad, 30 Agustus 1947. Diakses melalui www.delpher.nl.

Chung Hua Tsung Hui, Memorandum Outlining Acts of Violence and Inhumanity Perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese Before and After the Dutch Police Action was Enforced on July 21, 1947.

Bataviaasch Handelsblad, 10 Oktober 1879.

DLC Liberation of Bantool Chinese and Their Evacuation to Djokja, 12 Dec 1948, 2.24.04.03, 15098, Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië, Nationaal Archief, The Hague, <http://hdl.handle.net/10648/8eb6b657-cd84-eff5-1353-493ef35c67d7>

De Nederlander. 30 Agustus 1947. Diakses melalui www.delpher.nl.

Hariwarta. 8 Agustus 1948.

Sin Po. 30 Desember 1948.

_____. 31 Desember 1948.

Oei, The Tjiang. Januari 1943. "Hua Chiao Chung Hui." Dalam Sinar Matahari.

Artikel dan Buku

Anderson, Benedict R. (2018) Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang Dan Perlawanan Di Jawa, 1944-1946. Serpong, Tangerang: Marjin Kiri.

Benda, Harry J. (1983) *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Dordrecht etc., The Hague: Foris Publications.

Fakih, Farabi. (2017). Keraton dan Rakyat: Kerja Sama Menuju Kemerdekaan Indonesia. In Fakih, F., Margana, S., Sasi, G. A., Utama, W. S., & Winardi, U. N. (Ed.), *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949* (hlm. 4). Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa.

Goan, Tan Po. (1945). "Chinese Problem in Indonesia." Essay. In *The Voice of Free Indonesia*, 20–25. Djakarta, Indonesia: Kementerian Informasi dan Informatika.

Kwartanada, Didi. (2002). "Chinese Leadership and Organization in Yogyakarta during the Japanese Occupation." *Southeast Asian Minorities in the Wartime Japanese Empire*.

Kwartanada, Didi. (2002). "Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta between the 1930s and 1945."

Depdikbud. (1991). Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Depdikbud.

Suryadinata, Leo. (1999). Political thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995: a Sourcebook. Singapore: Singapore University Press.

NIOD, KITLV, and NIMH. (2022). "The War in Indonesia 1945-1949." Essay. In Beyond the Pale Dutch Extreme Violence in The Indonesian War of Independence, 1945-1949. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Oei, The Tjiang. (1943). "Hua Chiao Chung Hui." Sinar Matahari, January 15.

Putri, C. D. (2013). Prasasti Tionghoa Jawa sebagai Simbol Hubungan Baik Masyarakat Tionghoa dan Kasultanan Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Setyowati, U. (2018). Perjanjian Dwikewarganegaraan: Kehidupan Etnis Tionghoa di Kota Yogyakarta (1950-1970). In Ilmu Sejarah vol. 3 no. 3 (p. 363). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Twang, Peck Yang. (1998). The Chinese Business élite in Indonesia and the Transition to Independence, 1940-1950. Kuala Lumpur, Malaysia: Oxford University Press.